

Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Pengadilan Militer III-17 Manado

Evaluation Of Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure Of Financial Statements At Military Court III-17 Manado

Sabdi Apriyansah Sahrullah¹, David Saerang², Dhullo Afandi³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :

[1sabdisahrullah@gmail.com](mailto:sabdisahrullah@gmail.com), [2dpesaerang@gmail.com](mailto:dpesaerang@gmail.com), [3afandiafandibaksh@gmail.com](mailto:afandiafandibaksh@gmail.com)

Abstrak: Standar akuntansi pemerintah merupakan suatu standar, pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengadilan Militer III-17 Manado telah menyajikan laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan pada Pengadilan Militer III-17 Manado dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan di Pengadilan Militer III-17 Manado telah dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata kunci: Evaluasi, SAP, Laporan Keuangan

Abstract: Government accounting standards is a standard, a guideline in compiling and presenting financial reports in government, both central and local governments. Government accounting standards are regulated in Government Regulation No. 71 of 2010. Military Court III-17 Manado has presented the financial statements. The purpose of this study was to evaluate the suitability of the recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial statements at the Military Court III-17 Manado with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. This research uses descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial statements at the Military Court III-17 Manado has been made in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

Keywords : Evaluation, SAP, Financial Statements.

1. PENDAHULUAN

Pada titik ini, pemerintah berlomba untuk mencapai pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik adalah konsep bahwa pemerintahan, masyarakat, dan swasta mencapai konsensus dalam proses pemerintahan di sebuah negara dan dapat bersama-sama menjelaskan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Contoh bukti dari yang diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang baik adalah perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam ruang lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Transparansi didasarkan pada hak masyarakat umum untuk secara jelas dan keseluruhan memahami tugas dari pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepadanya dan mematuhi akan hukum dan undang-undang, dan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik. Sedangkan Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban suatu organisasi atas keberhasilan atau kegagalannya untuk mewujudkan tujuan dan patokan yang akan direncanakan, untuk meningkatkan jalan dari masyarakat menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), dan mendorong transparansi dan akuntabilitas di pemerintah pusat dan daerah.

Adapun yang merupakan yang telah pemerintah melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan pemerintahan yaitu untuk penyempurnaan kebijakan-kebijakan akuntansi di pemerintahan yaitu berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dirancang sebagai panduan dasar untuk menyusun keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Widya

Diterima: 16-09-2022; Disetujui untuk Publikasi: 09-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Majampoh 2021:1732). Diterbitkannya peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 tentang SAP menjadi acuan dalam menghasilkan laporan pemerintah menjadi lebih baik dan untuk menjadikan patokan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun dan dipakai untuk penyediaan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan suatu entitas selama satu periode.

Laporan Keuangan Pemerintahan dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Dimana haruslah dibuat sesuai peraturan yang ada yaitu peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010, supaya pengguna dapat dengan baik dan mudah memahami karena laporan keuangan adalah sesuatu sangat penting untuk dipahami oleh publik dimana dimasa ini publik bisa dan dapat melihat secara mendalam kinerja pada pemerintah dari hal efisien dan efektif dalam menggunakan anggaran negara. Dalam melihat kinerja ketaatan menggunakan anggaran, laporan keuangan dalam penelitian ini pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung (MA) hasil pelaporan (BPK pada tahun 2020 MA diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi dalam proses tindak lanjut pada pemeriksaan BPK sampai dengan tahun 2020 ada 1.163 rekomendasi dengan nilai Rp. 34.909.171.509,06, dari dari apa yang dijelaskan terdapat rekomendasi dalam tahap proses tindak lanjut atau belum sesuai total 99 dari rekomendasi yaitu sebesar Rp. 5.214.367.727,58 atau sebesar 8,51%. Hal ini menggambarkan bahwa di Mahkama Agung masih terdapat beberapa hal yang masih berhubungan dengan kebijakan akuntansi yang belum terpenuhi. Pengadilan Militer III-17 Manado merupakan suatu bagian dari entitas pelaporan, dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi di Pengadilan Militer III-17 Manado berdampak pada Mahkamah Agung. Maka dari penjelasan yang terjadi sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-17 Manado.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Menurut Hartono dan Namira (2018:2) dalam bukunya bahwa Akuntansi adalah sebuah seni pencatatan, menggolongkan, pengikhtisaran, dari pelaporan yang sangat baik untuk unit moneter dari transaksi dalam hal keuangan dan juga transaksi yang berisikan tentang kejadian lain yang berhubungan langsung terhadap keuangan perusahaan dengan penafsiran sifat-sifat pencatatan tersebut. Menurut Anwar Sadat (2020:9). Akuntansi merupakan suatu langkah dalam mencatat, mengukur, mengklasifikan, pengikhtisaran akan transaksi dan semua yang berkaitan dengan suatu proses keuangan, menginterpretasikan dari hasil serta menyajikan laporan. Berdasarkan dari beberapa pengertian yang ada dapat disimpulkan akuntansi adalah suatu wadah informasi yang berisi pencatatan, mengklasifikasikan dan pelaporan informasi yang baik juga relevan pada pihak yang memerlukan informasi tersebut.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar yang dibuat untuk digunakan oleh penyusun akuntansi laporan keuangan dalam hal ini pemerintah dalam memberikan informasi semestinya untuk disajikan pada orang-orang yang memerlukan informasi. Terdapat dua produk perundangan tentang SAP yang pertama yaitu peraturan pemerintahan No. 24 tahun 2005 dan telah diperbarui oleh peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010. Berdasarkan dari peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa SAP merupakan peraturan yang berisikan tentang hal-hal dari sebuah entitas yang harus dipatuhi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan baik pusat ataupun daerah.

2.3 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Fitra Halkadri (2019:13), Komponen yang harus ada dalam sebuah laporan keuangan pemerintahan yang terdapat didalamnya laporan keuangan dalam melakukan pelaksanaan sebuah anggaran (*budgetary reports*) dan juga berikan tentang laporan keuangan dari seluruh pos-pos laporan keuangan pemerintahan.

2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran yaitu sebuah laporan yang menyajikan berupa ringkasan dari sumber, pemberian anggaran, dan penggunaan anggaran dimana untuk diolah oleh pemerintahan, untuk membandingkan antara hal yang telah direalisasikan dan anggaran yang digunakan pada suatu periode. Unsur yang ada langsung pada LRA terdapat empat unsur yang terdiri dari pendapatan LRA,

belanja, transfer, dan pembiayaan. Adapun proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan LRA dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan
 - a. Pendapatan LRA harus diakui disaat pendapatan diterima dalam rekening kas.
 - b. Belanja diakui disaat terjadi suatu pengeluaran pada rekening kas.
 - c. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui disaat terjadi diterima atau dikeluarkan dari rekening kas.
2. Pengukuran
 - a. Pendapatan LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tercatat dalam penerimaan dengan menggunakan azas bruto.
 - b. Belanja diukur sesuai nilai nominal yang tercatat dalam dokumen.
 - c. Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan nominal yang tercatat dalam penerimaan dengan menggunakan azas bruto.
3. Penyajian dan pengungkapan
 - a. Pendapatan LRA disajikan sesuai pada jenis pendapatan LRA dan akan lebih jelas diungkapkan dalam CALK.
 - b. Beban disajikan sesuai pada jenis belanja dalam LRA dan akan lebih jelas diungkapkan dalam CALK.
 - c. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA akan lebih jelas diungkapkan dalam CALK.

2.3.2 Neraca

Neraca yaitu laporan yang menjelaskan tentang posisi dari suatu keuangan entitas akuntansi tentang aktiva atau aset dan pasiva yang berisikan kewajiban dan ekuitas pada periode pelaporan akuntansi. poin yang mencakup tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Adapun proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari neraca yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan
 - a. Aset diakui disaat terjadi masa manfaat ekonomi telah dimiliki pemerintahan dan memiliki biaya yang bisa diukur terima atau kepemilikan kekuasaan berpindah.
 - b. Kewajiban diakui disaat terjadi peminjaman terima dan disaat kewajiban muncul.
2. Pengukuran
 - a. Aset diukur kas dan piutang dicatat sesuai dengan nilai nominal, investasi jangka pendek dan panjang dicatat sebesar peroleh, persediaan dicatat sesuai biaya peroleh (pembelian) bila diproduksi sendiri atau nilai wajar apabila diperoleh dari donasi/rampasan, dan aset tetap atau non lancar dicatat sesuai biaya diperoleh.
 - b. Kewajiban diukur berdasarkan nilai nominal.
3. Penyajian dan pengungkapan
 - a. Aset disajikan menjadi aset lancar dan aset tetap dalam neraca dan diungkapkan dalam CALK.
 - b. Kewajiban disajikan menjadi kewajiban jangka pendek dan panjang di neraca dan diungkapkan dalam CALK.

2.3.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yaitu suatu laporan dimana memberikan rincian tentang sumber daya dari ekonomi meningkatkan pemerataan dan pemanfaatannya diolah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan pada suatu periode. Adapun proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan LO yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan
 - a. Pendapatan diakui disaat timbul kepemilikan atas pendapatan dan disaat pendapatan direalisasikan.
 - b. Beban diakui disaat timbul kewajiban, penggunaan aset, dan penyusutan.
2. Pengukuran
 - a. Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai nominal yang tercatat dalam penerimaan dengan menggunakan azas bruto.
 - b. Beban diukur sesuai nilai nominal yang tercatat dalam dokumen atau diukur dengan perhitungan akuntansi ketika terjadinya penurunan masa manfaat.
3. Penyajian dan pengungkapan

- a. Pendapatan disajikan atas sumber pendapatan dan lebih rinci diungkapkan dalam CALK.
- b. Beban disajikan sesuai dengan jenis beban dan lebih rinci diungkapkan dalam CALK

2.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menyajikan tentang kenaikan ataupun penurunan dari ekuitas tahun tersebut yang dibandingkan pada laporan tahun sebelum. Dimana ekuitas awal dikurangi surplus maupun defisit dari laporan sehingga mendapatkan ekuitas akhir. Adapun isi penyajian laporan perubahan ekuitas yaitu sebagai berikut:

1. Ekuitas awal
2. Surplus atau defisit
3. Koreksi-koreksi ekuitas
4. Ekuitas akhir

2.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan yaitu menjelaskan secara lengkap atas jumlah yang tercantum di dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Di dalam CALK juga membahas tentang informasi aturan akuntansi patokan dari entitas dan informasi lainnya untuk menjadi syarat atau diharuskan untuk diungkap dalam SAP dan dijelaskan juga yang diperlukan dalam menciptakan penyajian laporan yang baik. Adapun penyajian-penyajian dalam CALK yaitu sebagai berikut:

1. Penyajian informasi yang rinci tentang entitas.
2. Penyajian rinci dan menjelaskan dari pos-pos yang ada di laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti tertarik untuk penggunaan dari jenis penelitian Kualitatif dan melakukan pendekatan Deskriptif. Ini dipilih oleh peneliti karena dapat menjelaskan secara terperinci atas kejadian, situasi ataupun aktivitas dengan cara yang jelas yaitu menggambarkan dari data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti berfokus dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian menggunakan dua data yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian yaitu wawancara sedangkan data sekunder dalam penelitian yaitu berupa data.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu penggunaan metode deskriptif kualitatif. Adapun proses evaluasi peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data gambaran umum tentang Pengadilan Militer III-17 Manado
2. Mengevaluasi data telah didapatkan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pengadilan Militer III-17 Manado
3. Menarik kesimpulan apakah sesuai atau tidak sesuai dan diberikan saran

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengakuan dan Pengukuran Transaksi di Pengadilan Militer III-17 Manado

Transaksi yang terjadi pada Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai tahun anggaran 2021 dimana terdapat tiga golongan yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Proses pembayaran terjadi dengan dua proses yaitu Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP). Untuk pembayaran LS bendahara melakukan pengajuan SPM LS ke KPPN untuk diterbitkan SP2D sedangkan untuk pembayaran UP harus terlebih dulu melakukan transaksi belanja hingga lebih dari 50% atau sebesar Rp. 21.000.000 dari dana yang ada pada bendahara yaitu sebesar 42.000.000 setelah terpakai lebih dari 50% maka bendahara dapat mengajukan SPM GUP ke KPPN untuk diterbitkan SP2D. kemudian Pengadilan Militer III-17 Manado mencatatnya secara komputerisasi menggunakan aplikasi yang disebut SAIBA dan yang dijadikan dasar pengakuan dan pengukuran apabila terjadi transaksi yaitu sesuai tanggal dan nominal tercatat jurnal transaksi dengan tahun anggaran 2021 sesuai aturan yang ada yaitu berdasarkan peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 tentang SAP sebagai acuan.

1. Pengakuan dan pengukuran belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan pejabat Negara

Tanggal	Nama Akun	D	K
04 Januari 2021	Belanja Pegawai Pembayaran Tunjangan Pejabat	99.860.000	
	Ditagihkan ke Entitas Lain		99.860.000

Jurnal diatas merupakan jurnal yang dibuat Pengadilan Militer III-17 Manado untuk pengakuan dan pengukuran atas transaksi belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan pejabat negara negara bulan januari dengan metode pembayaran Langsung (LS). Secara pengakuan Pengadilan Militer III-17 Manado belanja pegawai diakui sesuai tanggal yang tertera dalam jurnal yaitu 04 januari 2021 dan untuk pengukuran Pengadilan Militer III-17 Manado belanja pegawai diukur sesuai nominal yang tertera dalam jurnal yaitu sebesar Rp. 99.860.000.

2. Pengakuan dan pengukuran belanja barang untuk penggantian uang persediaan keperluan kantor

Tanggal	Nama Akun	D	K
08 Juni 2021	Belanja Barang Keperluan Kantor	26.452.567	
	Ditagihkan ke Entitas Lain		26.452.567

Jurnal diatas merupakan jurnal yang dibuat Pengadilan Militer III-17 Manado untuk pengakuan dan pengukuran atas transaksi belanja barang untuk penggantian uang persediaan keperluan kantor dengan metode pembayaran Uang Persediaan (UP). Secara pengakuan Pengadilan Militer III-17 Manado belanja barang diakui sesuai tanggal yang tertera dalam jurnal yaitu 08 juni 2021 dan untuk pengukuran Pengadilan Militer III-17 Manado belanja pegawai diukur sesuai nominal yang tertera dalam jurnal yaitu sebesar Rp. 26.452.567.

3. Pengakuan dan pengukuran belanja modal untuk pembayaran pengadaan genset

Tanggal	Uraian Nama Akun	D	K
04 Juni 2021	Belanja Modal Pengadaan Genset	355.092.500	
	Ditagihkan ke Entitas Lain		355.092.500

Jurnal diatas merupakan jurnal yang dibuat Pengadilan Militer III-17 Manado untuk pengakuan dan pengukuran atas transaksi belanja modal untuk pembayaran pembayaran genset dengan metode pembayaran Langsung (LS). Secara pengakuan Pengadilan Militer III-17 Manado belanja pegawai diakui sesuai tanggal yang tertera dalam jurnal yaitu 04 juni 2021 dan untuk pengukuran Pengadilan Militer III-17 Manado belanja pegawai diukur sesuai nominal yang tertera dalam jurnal yaitu sebesar Rp. 355.092.500.

4.1.2 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-17 Manado

Penyajian dan pengungkapan terdiri dari LRA, neraca, LO, LPE, dan CALK mengevaluasi tentang format pelaporan yang dihasilkan dan hal telah diungkapkan dalam laporan itu sendiri dan di dalam CALK terhadap pos-pos yang telah dibuat.

1. Laporan realisasi anggaran

Penyajian informasi LRA yang ada di Pengadilan Militer III-17 sudah sesuai dengan yang ada pada peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 penyajian informasi diuraikan dengan rinci dan diulangi informasi berupa nama entitas, lingkup entitas akuntansi, periode, mata uang dan satuan angka yang digunakan. Periode dari LRA harus menyajikan walau hanya sekali setahun. Informasi yang disajikan dalam pos LRA mencakup belanja. Diungkapkan dalam pos-pos CALK sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 1.730.645.715
- b. Belanja barang sebesar Rp. 1.104.955.202
- c. Belanja modal sebesar Rp. 434.050.000

2. Neraca

Penyajian informasi dalam neraca di Pengadilan Militer III-17 Manado sudah sesuai dengan yang ada pada peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 penyajian dimana klasifikasi aset mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar berupa kas dan setara kas atau segera untuk digunakan, dimiliki dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan, aset tetap dan aset tak berwujud merupakan aset yang memiliki sifat jangka panjang yaitu waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek diharuskan untuk diselesaikan sebelum 12 (dua belas)

bulan dan kewajiban-kewajiban lainnya diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka panjang. Serta ekuitas yang merupakan kekayaan bersih pemerintah. Diungkapkan dalam pos-pos CALK sebagai berikut :

- a. aset lancar yang terdiri dari kas di bendahara pengeluaran, persediaan sebesar Rp. 1.035.350, dan persediaan yang belum terealisasi.
- b. Aset tetap yang terdiri dari tanah sebesar Rp. 8.901.554.000, peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.003.024.877, Gedung dan bangunan sebesar Rp. 16.221.752.858, jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp. 190.000, dan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. 2.383.458.016.
- c. Aset lainnya yang terdiri dari aset tak berwujud (software komputer) sebesar Rp. 4.593.600, aset lain-lain, dan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lain-lain sebesar Rp. 4.019.400.
- d. Kewajiban jangka pendek atau kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp. 24.329.731.
- e. Ekuitas sebesar Rp. 27.720.343.538.

3. Laporan operasional

Penyajian informasi LO yang ada di Pengadilan Militer III-17 Manado sudah sesuai dengan yang ada pada peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 penyajian informasi diuraikan dengan rinci dan diulangi informasi berupa nama entitas, lingkup entitas akuntansi, periode, mata uang dan satuan angka yang digunakan. Periode dari LO harus menyajikan walau hanya sekali setahun. Informasi yang disajikan dalam pos LO mencakup dan belanja. Diungkapkan dalam pos-pos CALK sebagai berikut :

- a. Beban pegawai sebesar Rp. 1.730.645.715
- b. Beban persediaan sebesar Rp. 33.104.389
- c. Beban barang dan jasa sebesar Rp. 817.548.805
- d. Beban pemeliharaan sebesar Rp. 170.135.846
- e. Beban perjalanan dinas sebesar Rp. 85.396.555
- f. Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 1.059.357.535

4. Laporan perubahan ekuitas

Penyajian informasi dalam LPE di Pengadilan Militer III-17 Manado telah berdasarkan pada peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 penyajian informasi harus Isi dari laporan perubahan ekuitas yang disajikan berupa pos-pos seperti ekuitas awal, surplus(defisit) LO, transaksi antar entitas dan ekuitas akhir. Diungkapkan dalam pos-pos CALK sebagai berikut :

- a. Ekuitas awal sebesar Rp. 28.346.691.466
- b. Surplus (defisit) LO sebesar Rp. 3.896.188.845
- c. Transaksi antar entitas sebesar Rp. 3.269.840.917
- d. Ekuitas akhir sebesar Rp. 27.720.343.538

4.2 Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan pada penelitian kali ini guna mencapai tujuan dari penelitian maka pembahasan terhadap pengakuan dan pengukuran transaksi serta penyajian dan pengungkapan atas masing-masing laporan keuangan yang dihasilkan.

4.2.1 Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi anggaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka evaluasi untuk mengetahui penerapan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan LRA di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan menggunakan indikator sesuai atau tidak sesuai. Berikut peneliti paparkan tabel perbandingan antara laporan realisasi anggaran Pengadilan Militer III-17 Manado dengan peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010.

Tabel 1. Evaluasi Kesesuain Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun Anggaran 2021 dengan PP No. 71 Tahun 2010

Unsur	Pengadilan Militer III-17 Manado Laporan Realisasi Anggaran	PP No. 71 Tahun 2010	Ket
Pengakuan belanja	Dalam LRA Pengadilan Militer III-17 Manado belanja diakui sesuai tanggal jurnal. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tanggal jurnal dan tanggal bukti transaksi dikarenakan untuk	Belanja diakui disaat terjadi suatu pengeluaran pada rekening kas.	Sesuai

	pembayaran gaji pegawai harus diajukan pada bulan sebelumnya dan belanja keperluan kantor harus memenuhi syarat 50% dari uang yang dipegang bendahara.		
Pengukuran belanja	Dalam LRA Pengadilan Militer III-17 Manado Belanja diukur sesuai nilai nominal yang tercatat pada jurnal.	Belanja diukur sesuai nilai nominal yang tercatat dalam dokumen.	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan belanja	Dalam LRA Pengadilan Militer III-17 Manado Belanja disajikan menurut jenis belanja. Belanja pada tahun anggaran 2021 yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dalam LRA dan lebih rinci diungkapkan dalam pos-pos CALK.	Beban disajikan sesuai pada jenis belanja dalam LRA dan akan lebih jelas diungkapkan dalam CALK.	Sesuai

(Sumber : Data olahan, 2022)

4.2.2 Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Neraca

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka evaluasi untuk mengetahui penerapan PP nomor 71 tahun 2010 atas klasifikasi, isi laporan neraca, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari aset dan kewajiban laporan neraca di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan menggunakan indikator sesuai atau tidak sesuai. Berikut peneliti paparkan tabel perbandingan antara laporan neraca Pengadilan Militer III-17 Manado dengan PP nomor 71 tahun 2010.

Tabel 2. Evaluasi Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Neraca Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun Anggaran 2021 dengan PP No. 71 Tahun 2010

Pengadilan Militer III-17 Manado		Pp No. 71 Tahun 2010	Ket
Unsur	Neraca		
Pengakuan aset	Dalam neraca Pengadilan Militer III-17 Manado aset diakui saat diterima atau kepemilikan kekuasaan berpindah dicatat sesuai tanggal jurnal. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tanggal jurnal dan tanggal bukti transaksi dikarenakan untuk pembayaran gaji pegawai harus diajukan pada bulan sebelumnya dan belanja keperluan kantor harus memenuhi syarat 50% dari uang yang dipegang bendahara.	Aset diakui disaat terjadi masa manfaat ekonomi telah dimiliki pemerintahan dan memiliki biaya yang bisa diukur terima atau kepemilikan kekuasaan berpindah.	Sesuai
Pengukuran aset	Dalam neraca Pengadilan Militer III-17 Manado aset diukur dimana kas, persediaan, aset tetap dicatat sesuai nilai nominal yang tertera pada jurnal.	Aset diukur kas dan piutang dicatat sesuai dengan nilai nominal, investasi jangka pendek dan panjang dicatat sebesar peroleh, persediaan dicatat sesuai biaya peroleh (pembelian) dan aset tetap dicatat sesuai biaya diperoleh.	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan aset	Dalam neraca Pengadilan Militer III-17 Manado tahun anggaran 2021 aset disajikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya dalam neraca dan diungkapkan dalam pos-pos CALK.	Aset disajikan menjadi aset lancar dan aset tetap dalam neraca dan diungkapkan dalam CALK.	Sesuai
Pengakuan kewajiban	Dalam neraca Pengadilan Militer III-17 Manado kewajiban diakui saat kewajiban muncul .	Kewajiban diakui disaat terjadi peminjaman terima	Sesuai

Pengukuran kewajiban	Dalam neraca Pengadilan Militer III-17 Manado kewajiban diukur berdasarkan nilai yang tertera dalam jurnal.	dan disaat kewajiban muncul. Kewajiban diukur berdasarkan nilai nominal.	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan kewajiban	Dalam neraca Pengadilan Militer III-17 Manado tahun anggaran 2021 kewajiban menyajikan kewajiban kepada pihak ketiga dalam neraca dan diungkapkan dalam pos CALK.	Kewajiban disajikan menjadi kewajiban jangka pendek dan panjang di neraca dan diungkapkan dalam CALK.	Sesuai

(Sumber : Data olahan, 2022)

4.2.3 Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Operasional

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka evaluasi untuk mengetahui penerapan PP nomor 71 tahun 2010 atas struktur laporan operasional, periode pelaporan, isi laporan operasional, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan operasional di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan menggunakan indikator sesuai atau tidak sesuai. Berikut peneliti paparkan tabel perbandingan antara laporan operasional Pengadilan Militer III-17 Manado dengan PP nomor 71 tahun 2010.

Tabel 3. Evaluasi Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Operasional Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun Anggaran 2021 dengan PP No. 71 Tahun 2010

Pengadilan Militer III-17 Manado		PP No. 71 Tahun 2010	Ket.
Unsur	Laporan Operasional		
Pengakuan beban	Dalam LO Pengadilan Militer III-17 Manado beban diakui saat terjadi penggunaan aset sesuai tanggal jurnal timbulnya kewajiban akibat penggunaan beban tetapi belum pada periode pembayaran contohnya tagihan internet, listrik dan telepon atau saat terjadi penyusutan. terdapat perbedaan yang signifikan antara tanggal jurnal dan tanggal bukti transaksi dikarenakan untuk pembayaran gaji pegawai harus diajukan pada bulan sebelumnya dan belanja keperluan kantor harus memenuhi syarat 50% dari uang yang dipegang bendahara.	Beban diakui disaat timbul kewajiban, penggunaan aset, dan penyusutan.	Sesuai
Pengukuran beban	Dalam LO Pengadilan Militer III-17 Manado beban diukur sesuai nilai nominal yang tertera dalam jurnal atau saat terjadinya penyusutan.	perhitungan akuntansi ketika terjadinya penurunan masa manfaat.	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan beban	Dalam LO Pengadilan Militer III-17 Manado tahun anggaran 2021 beban disajikan menurut jenis beban yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban penyusutan dan amortisasi akan lebih rinci diungkapkan dalam pos-pos CALK.	Beban disajikan sesuai dengan jenis beban dan lebih rinci diungkapkan dalam CALK.	Sesuai

(Sumber : Data olahan, 2022)

4.2.4 Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka evaluasi untuk mengetahui penerapan PP nomor 71 tahun 2010 atas isi laporan perubahan ekuitas, di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan menggunakan indikator sesuai atau tidak sesuai. Berikut peneliti paparkan tabel perbandingan antara laporan neraca Pengadilan Militer III-17 Manado dengan PP nomor 71 tahun 2010.

Tabel 4. Evaluasi Kesesuain Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Perubahan Ekuitas Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun Anggaran 2021 dengan PP No. 71 Tahun 2010

Pengadilan Militer III-17 Manado			
Unsur	Laporan Perubahan Ekuitas	PP No. 71 Tahun 2010	Ket
Penyajian laporan perubahan ekuitas	Dalam LPE Pengadilan Militer III-17 Manado Isi laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut : 1. Ekuitas awal 2. Surplus/defisit-LO 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas 4. Ekuitas akhir	Isi dari laporan perubahan ekuitas terdiri dari : 1. Ekuitas awal 2. Surplus/defisit-LO 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas 4. Ekuitas akhir	Sesuai

(Sumber : Data olahan, 2022)

4.2.5 Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan CALK

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka evaluasi untuk mengetahui penerapan PP nomor 71 tahun 2010 atas penyajian informasi yang rinci tentang entitas dan penyajian rinci dan menjelaskan dari pos-pos yang ada di laporan keuangan di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan menggunakan indikator sesuai atau tidak sesuai. Berikut peneliti paparkan tabel perbandingan antara CALK Pengadilan Militer III-17 Manado dengan PP nomor 71 tahun 2010.

Tabel 5. Evaluasi Kesesuain Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan CALK Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun Anggaran 2021 dengan PP No. 71 Tahun 2010

Pengadilan Militer III-17 Manado			
Unsur	CALK	Pp No. 71 Tahun 2010	Ket
Penyajian informasi yang rinci tentang entitas	Dalam CALK Pengadilan Militer III-17 Manado mengungkapkan informasi entitas secara umum yang merupakan penjelasan umum seperti profil dan kebijakan teknis, pendekatan penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi, dasar pengukuran, dan kebijakan akuntansi untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan	Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang menggambarkan entitas secara umum untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai entitas akuntansi	Sesuai
Penyajian rinci dan menjelaskan dari pos-pos yang ada	Dalam CALK Pengadilan Militer III-17 Manado menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam LRA, neraca, LO, dan LPE.	Harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam LRA, neraca, LO, dan LPE.	Sesuai

(Sumber : Data olahan, 2022)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didalam pembahasan, peneliti bisa menyimpulkan bahwa :

1. Pengakuan dan pengukuran terhadap transaksi di Pengadilan Militer III-17 Manado tahun anggaran 2021 telah dibuat dengan baik berdasarkan dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dimulai dari LRA, neraca, LO, LPE dan CALK di Pengadilan Militer III-17 Manado tahun anggaran 2021 sebagai entitas akuntansi telah dibuat dengan baik berdasarkan dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.2 Saran

Mengingat secara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di Pengadilan Militer III-17 Manado telah sesuai berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, maka sebaiknya dalam pelaksanaan pelaporan akuntansi dapat dipertahankan dengan mengambil contoh yang terjadi pada tahun ini, yaitu tahun anggaran 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitra, H. (2019). Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. IRDH: Purwokerto.
- Hartono., Rahmi, U. N. (2018). Pengantar Akuntansi Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahkamah Agung RI. (2020). Laporan Tahunan 2020 Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan.
- Majampoh, W. T., & Christian, D. (2021). *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 9(3): 1731–1741.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/%20view/35961>
- Pemerintah RI. (2010). Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sadat, A. (2020). Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan) cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish.